



Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia

Nadia Kusuma Dewi

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: nadiakusuma453@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Reformasi 1998 di Indonesia markahl titik balik penting dalam transisi dari rezim otoriter Orde Baru ke era demokratis. Krisis moneter Asia 1997, yang memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjadi latar belakang reformasi ini. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, memunculkan gelombang protes yang luas, terutama dari kalangan mahasiswa. Kerusuhan pada Mei 1998, termasuk Tragedi Trisakti, menjadi pendorong utama bagi Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Tujuan utama reformasi adalah mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia, menghapus praktek KKN, dan melindungi hak asasi manusia. Pelaksanaan pemilihan umum bebas pada tahun 1999 menandai langkah penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Mahasiswa dan masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses demokratisasi, memaksa pemerintahan untuk melakukan perubahan. Reformasi ini membawa perubahan signifikan dalam struktur politik, termasuk peningkatan kebebasan berpendapat dan transparansi pemerintahan. Dengan demikian, reformasi 1998 membuka jalan bagi pembentukan tradisi demokratis di Indonesia, meskipun tantangan dalam konsolidasi demokrasi masih ada.

Kata kunci : *Reformasi 1998, Demokrasi, Krisis Moneter, KKN*

ABSTRACT

The 1998 Reformation in Indonesia marked an important turning point in the transition from the authoritarian New Order regime to the democratic era. The 1997 Asian monetary crisis, which worsened economic conditions and increased the practice of corruption, collusion, and nepotism (KKN), became the background to this reform. The people were increasingly dissatisfied with the poor social and economic conditions, giving rise to a wave of widespread protests, especially among students. The riots in May 1998, including the Trisakti Tragedy, became the main impetus for President Soeharto to resign on May 21, 1998. The main goal of the reform was to realize the democratization of the political system in Indonesia, eliminate the practice of KKN, and protect human rights. The implementation of free general elections in 1999 marked an important step in realizing people's sovereignty. Students and the community actively participated in the democratization process, forcing the government to make changes. This reform brought significant changes to the political structure, including increasing freedom of speech and government transparency. Thus, the 1998 reform paved the way for the establishment of a democratic tradition in Indonesia, although challenges in consolidating democracy still remain.

Keywords: *1998 Reformation, Democracy, Monetary Crisis, Corruption, Collusion and Nepotism*

PENDAHULUAN

Reformasi adalah proses transisi dari kondisi kehidupan lama menuju kondisi kehidupan baru yang lebih baik. Di Indonesia, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 merupakan gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, khususnya dalam memperbaiki tatanan kehidupan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial (Maria Winda Klaudia & Ida Bagus Nyoman Wartha, 2020). Menjelang Reformasi 1998, gerakan reformasi muncul sebagai respons terhadap berbagai krisis yang melanda kehidupan masyarakat Indonesia. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial menjadi faktor pendorong utama lahirnya gerakan ini, di samping sejumlah peristiwa terkait lainnya. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi indikator penting yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga hampir seluruh rakyat Indonesia memberikan dukungan penuh.

Salah satu persoalan utama yang mendorong lahirnya reformasi adalah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami lonjakan yang signifikan. Banyak warga harus antri untuk mendapatkan sembako tersebut. Di sisi lain, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkelola dengan baik. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan (Maria Winda Klaudia & Ida Bagus Nyoman Wartha, 2020). Ketika kita berbicara perkembangan politik sangat susah kita membedakan pembangunan politik dengan perkembangan politik namun yang jelas perkembangan politik itu terjadi bertahap dan bertahan lama sementara pembangunan politik perubahan secara cepat.

Menurut (Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, & Patric C. Wauran, 2020), ekonomi adalah sebuah studi tentang perilaku manusia yang didasarkan pada interaksi antara tujuan individu dan keterbatasan sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.

Pada awal era reformasi, masyarakat umum, pengusaha, dan investor termasuk mereka asing menyimpan harapan besar terhadap kemampuan dan dedikasi pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian nasional dan menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dari warisan rezim Orde Baru, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); supremasi hukum; hak asasi manusia (HAM); tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; peran ABRI dalam politik; masalah disintegrasi; dan lain-lain. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.

Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.000 per dollar AS. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak tahun 1998 (Maria Winda Klaudia & Ida Bagus Nyoman Wartha, 2020).

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi yang signifikan, yang dipicu oleh berbagai masalah yang telah lama menghantui negara. Gerakan reformasi ini dianggap sebagai solusi oleh rakyat Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang ada. Mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam gerakan ini menuntut adanya perubahan dalam sistem pemerintahan yang dikuasai oleh Presiden Soeharto. Mereka juga menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya, yang kemudian menjadi agenda nasional. Tindakan mahasiswa ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, dan gerakan mereka dianggap tidak memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan (Vionita Vara Fitrianti & Agung Bahroni, 2024).

Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru... (Nadia Kusuma Dewi)

Di Yogyakarta, reformasi 1998 dipelopori oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang memulai gerakan mereka dengan menggelar konferensi untuk membahas masalah-masalah yang timbul selama masa Orde Baru. Setelah itu, mahasiswa menginisiasi kelompok solidaritas yang melibatkan beberapa universitas di Yogyakarta, termasuk Universitas Gadjah Mada. Mereka menuntut penurunan harga bahan pokok dan reformasi politik. Gerakan mereka juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Yogyakarta dan kalangan intelektual serta tokoh agama. Demonstrasi yang terjadi di Yogyakarta sempat menimbulkan kericuhan sehingga Sultan memberi peringatan agar gerakan reformasi dilakukan dengan damai (Vionita Vara Fitrianti & Agung Bahroni, 2024).

Para penganut pendekatan konflik tidak hanya melihat perubahan sosial sebagai fenomena internal masyarakat, tetapi juga percaya bahwa perubahan sosial timbul dari adanya faktor-faktor internal yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini kurang ditekankan oleh para penganut pendekatan fungsionalisme struktural. Perubahan sosial, termasuk perubahan politik dan kekuasaan, sering kali disebabkan oleh kontradiksi intern dalam masyarakat, seperti distribusi kewenangan atau otoritas yang tidak merata (Rahman, 2022).

Perubahan sosial global mulai terlihat sekitar tahun 1990-an. Runtuhnya Uni Soviet mengakhiri periode panjang konflik internasional antara Blok Timur dan Blok Barat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, konflik internal, etnis, separatistis, dan perebutan kekuasaan menjadi lazim di banyak negara. Misalnya, gerakan *people power* yang berhasil menggulingkan Marcos di Filipina dan gerakan reformasi di Indonesia yang menghantarkan Soeharto turun dari jabatannya.

Dalam konteks ini, perubahan sosial tidak hanya terjadi karena faktor internal, tetapi juga dipicu oleh peristiwa geopolitik global seperti runtuhnya Uni Soviet. (Rahman, 2022) Ketika direnungkan lebih dalam, tampak bahwa tidak mungkin seorang presiden yang memiliki kendali penuh atas seluruh perangkat negara, termasuk kekuatan militer, dapat dijatuhkan. Namun, jika dilihat dari perspektif filsafat sejarah, di mana segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan dan pergeseran, maka kekuasaan pun akan berakhir, baik dalam kondisi baik maupun buruk. Turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya adalah hal yang wajar dan tidak terlepas dari peran masyarakat sipil yang menginginkan perbaikan dalam pengelolaan negara, yang dianggap menyimpang dari dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Runtuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam peta politik Indonesia. Momen tersebut menjadi penanda berakhirnya masa kelam dari orde sebelumnya. Respon masyarakat menjadi sangat reaktif setelah melewati periode yang dipenuhi ketakutan akan otoritarianisme. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada seorang presiden kini beralih ke lembaga perwakilan, mengingat kembali masa lalu yang kelam. Dalam ranah sosial-budaya, wacana tentang penguatan masyarakat sipil semakin berkembang; kebebasan berekspresi dan berpendapat mulai mendapatkan tempat karena model pemerintahan yang dominan sebelumnya telah ditolak dan digantikan oleh model pemerintahan demokratis. Banyak pengamat berpendapat bahwa demokrasi adalah pilihan ideal untuk mengatasi berbagai masalah hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang telah terperosok dalam korupsi.

Pasca-Soeharto merupakan waktu untuk memperbaiki diri, terutama dalam memperkuat proses demokratisasi agar dapat berlangsung sepenuhnya di Indonesia. Para pendukung demokrasi percaya bahwa Indonesia kini berada di jalur yang benar selama perbaikan dilakukan secara bertahap namun pasti menuju negara yang demokratis. Semangat untuk melakukan perubahan dan mereformasi pemerintahan serta tatanan sosial merupakan bagian dari transisi menuju demokrasi. Selama masa ini, elemen-elemen demokrasi seperti pengakuan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers, dan kebebasan

berserikat secara perlahan disiapkan menuju konsolidasi demokrasi. Proses ini berlangsung secara berurutan tetapi pasti, di mana setiap langkah awal menjadi syarat bagi langkah berikutnya (Rahman, 2022).

Reformasi telah membawa Indonesia dari rezim otoriter ke era keterbukaan, menciptakan euforia di kalangan masyarakat dengan harapan akan tatanan pemerintahan yang baru. Kehadiran reformasi di Indonesia bukan hanya hasil kerja kelompok elite semata. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran masyarakat sipil dalam gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel yang telah disusun ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam dengan menganalisis perubahan sosial dan politik yang terjadi selama dan setelah peristiwa Reformasi. Penulis memanfaatkan studi literatur sebagai sumber utama data, termasuk buku, artikel ilmiah, dan laporan sejarah yang relevan, guna membangun pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong gerakan reformasi. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada Reformasi 1998 sebagai contoh konkret untuk menganalisis transisi dari rezim otoriter Orde Baru menuju demokrasi. Data-data yang dianalisis meliputi krisis ekonomi yang parah, protes mahasiswa yang meluas, serta kerusuhan sosial yang menjadi pendorong utama tumbangnya rezim Soeharto. Melalui metode ini, penulis menggambarkan hubungan antara krisis moneter, korupsi, dan ketidakpuasan publik dengan perubahan institusi politik dan pemerintahan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diuraikan secara deskriptif untuk menunjukkan bagaimana Reformasi membawa transformasi demokratis yang signifikan meskipun masih menghadapi tantangan di masa konsolidasi demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Ekonomi dan Politik: Pemicu Gerakan Reformasi 1998

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perekonomian negara ini. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor lainnya seperti sosial, politik, dan keamanan. Periode krisis moneter tersebut dipandang sebagai salah satu masa paling sulit dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelum krisis moneter melanda, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama lebih dari tiga dekade. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai angka 7-8% per tahun. Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Praktik kapitalisme kroni dan korupsi yang merajalela, sistem perbankan yang lemah, serta ketergantungan yang besar pada aliran modal asing menjadi faktor-faktor yang mempercepat runtuhnya perekonomian Indonesia ketika terjadi gejolak di pasar keuangan regional pada pertengahan 1997. Krisis moneter di Indonesia bermula dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada Juli 1997. Dalam waktu singkat, nilai Rupiah terpuruk hingga mencapai titik terendah di angka Rp 17.000 per Dollar AS pada Januari 1998. Pelemahan nilai tukar Rupiah ini memicu gelombang kepanikan di kalangan investor dan pelaku ekonomi, yang kemudian memicu aksi penarikan dana besar-besaran dari sektor perbankan dan pasar modal. Akibatnya, terjadinya krisis likuiditas dan krisis kepercayaan yang akut di sektor perbankan dan keuangan (Ardi Sunardi, Wilda Nur Afiah, Siti Nuranisya Fadlah, & Eko Ribawati, 2024).

Dampak krisis moneter tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga meluas

Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru... (Nadia Kusuma Dewi)

ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jumlah pengangguran meningkat tajam dari sekitar 4,7 juta orang pada Agustus 1997 menjadi 8,1 juta orang pada Februari 1999. Angka kemiskinan juga melonjak dari 17,7% pada 1996 menjadi 23,5% pada 1999. Kondisi ini memicu gelombang protes dan kerusuhan sosial di berbagai daerah di Indonesia.

Dari sisi politik, krisis moneter turut memicu tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Pada Mei 1998, gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Pergantian kepemimpinan nasional ini menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie melakukan sejumlah langkah reformasi struktural di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Program rekapitalisasi perbankan dilanjutkan, sejumlah proyek infrastruktur ditunda, dan upaya restrukturisasi utang luar negeri diintensifkan. Meskipun proses pemulihan berjalan lambat, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas.

Krisis ini dimulai dengan krisis nilai tukar, yaitu melemahnya nilai tukar Rupiah yang terjadi sekitar bulan Juli 1997 dan mencapai titik terendah pada bulan Mei 1998. Dampaknya secara langsung mempengaruhi sektor moneter, terutama melalui penutupan beberapa bank yang bermasalah dan berkurangnya likuiditas perbankan. Munculnya krisis kepercayaan dari investor dan ekspektasi akan meluasnya skala krisis menyebabkan arus pelarian modal keluar, diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang mengakibatkan lonjakan tajam pada tingkat bunga. Sektor riil, khususnya sektor produksi, yang sudah tertekan akibat melemahnya Rupiah yang secara drastis meningkatkan kewajiban pembayaran utang luar negeri, semakin terpuruk dengan kenaikan suku bunga. Gangguan pada beberapa sektor produksi penting akhirnya kembali menekan sektor perbankan dalam bentuk peningkatan kredit bermasalah dan krisis likuiditas. Pada tahap ini, efek bola salju dan keterkaitan antar sektor saling berkontribusi dalam menarik perekonomian Indonesia menuju krisis ekonomi terburuk dalam 35 tahun terakhir (Rahman, 2022).

Penyebab utama krisis moneter 1997-1998 di Indonesia adalah ketidakstabilan sistem keuangan pada waktu itu. Banyak perusahaan dan konglomerasi yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar, sedangkan cadangan devisa negara terbatas. Ketika nilai tukar rupiah anjlok, utang luar negeri ini menjadi membengkak dan sulit untuk dibayar, memicu kepanikan di kalangan investor dan menyebabkan penarikan dana besar-besaran dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1997 masih mencapai 4,7% berkontraksi menjadi -13,1% pada tahun 1998. Angka inflasi melonjak dari 6,2% pada tahun 1997 menjadi 77,6% pada tahun 1998. Jumlah pengangguran meningkat drastis, dari 4,7 juta orang pada tahun 1997 menjadi 8,1 juta orang pada tahun 1998. Krisis moneter ini juga memicu gelombang demonstrasi dan kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia, semakin memperburuk kondisi sosial-politik. Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan lebih dari 1.000 orang serta merugikan material triliunan rupiah. Untuk mengatasi krisis moneter ini, pemerintah Indonesia dipaksa menerima program bantuan dari International Monetary Fund (IMF), yang mensyaratkan reformasi struktural di bidang ekonomi, termasuk penghapusan subsidi BBM, penutupan sejumlah bank, dan restrukturisasi utang (Ardi Sunardi, Wilda Nur Afiah, Siti Nuranisya Fadlah, & Eko Ribawati, 2024).

Kekalutan sosial dalam derajat tertentu bisa ditolerir jika pemerintah arif menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi. Namun, dalam suasana krisis yang melanda hampir semua lapisan masyarakat, pada awal bulan Mei 1998, pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Ini diikuti oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, yang merupakan sumber dari krisis politik dan krisis kepercayaan kepada pemerintah.

Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru... (Nadia Kusuma Dewi)

Mahasiswa mulai hilang kesabarannya dan mengulangi peran-peran yang telah dimainkan oleh para mahasiswa sebelumnya — seperti gerakan mahasiswa tahun 1966, 1974, dan 1978. Mahasiswa yang mengklaim dirinya sebagai “Angkatan 1998” itu mulai berdemonstrasi dengan turun ke jalan-jalan. Tuntutan yang semula sederhana saja (“Turunkan harga”) kemudian memiliki arti konotatif yang semakin luas. Kata “harga” berarti juga “Soe-HAR-to dan keluar-GA.” Jika sudah demikian, maka gerakan-gerakan mahasiswa dengan motif dan tujuan yang kompleks berkembang menjadi sebuah gerakan reformasi total (Suwirta).

Protes-protes sosial yang digerakkan oleh mahasiswa tersebut, dan didukung oleh kekuatan masyarakat lainnya, merupakan hasil logis dari rekayasa pembangunan politik Orde Baru selama tiga puluh tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para elit politik dan militer Orde Baru menggunakan kerangka pemikiran “the end of ideology” sebagai dasar utama rekayasanya. Depolitisasi kampus-kampus melalui kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1970-an di bawah kepemimpinan Mendikbud Daoed Joesoef, maupun kebijakan Wawasan Almamater pada tahun 1980-an di bawah pimpinan Mendikbud Nugroho Notosusanto, hanyalah berhasil menunda-nunda ketidakpuasan politik mahasiswa yang bersifat sementara. Demikian pula, penyederhanaan kekuatan sosial-politik dari 10 partai politik pada tahun 1971 menjadi 3 partai politik pada tahun 1973 hanya memendam ketidakpuasan elite politik yang tidak terakomodir oleh rekayasanya. Kebijakan “floating mass” atau massa mengambang pada tahun 1970-an juga hanya berhasil secara sementara meredam kekuatan dan aspirasi politik yang dimiliki masyarakat. Saat katup-katup pengaman yang sementara itu sudah rapuh dan tidak kuat lagi, gelombang tuntutan reformasi total mengalir seperti banjir deras. Demonstrasi mahasiswa merebak di berbagai universitas di Jawa dan luar Jawa. Tuntutan mereka tidak hanya sampai pada pengunduran diri Soeharto, tapi juga mencakup permintaan untuk menghilangkan penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Di samping itu, kekuatan-kekuatan politik lain yang mendukung gerakan reformasi mahasiswa juga menuntut revisi undang-undang terkait pemilihan umum, struktur dan posisi DPR/MPR, partai politik, subversi, dan topik-topik lainnya. Cara dan gaya tuntutan yang ditampilkan oleh mahasiswa sangat beragam—mulai dari turun ke jalan hingga melakukan long march menuju dewan perwakilan daerah, serta aksi duduk di kampus dengan mendengarkan agitator yang bersemangat. Semua aksi ini dilakukan dengan ciri khas mahasiswa, yaitu kreatif, menarik, penuh dengan sinisme, dan sarat kritik sosial.

Mahasiswa dan cendekiawan berupaya mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah melalui demonstrasi besar-besaran. Semangat mahasiswa ini telah menginspirasi buruh, petani, nelayan, dan pedagang kecil untuk turut serta dalam aksi demonstrasi. Namun, semua ini berkontribusi pada munculnya krisis sosial. Demonstrasi yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan kehidupan di perkotaan dipenuhi dengan kecemasan dan ketidaknyamanan, mendorong sebagian masyarakat, terutama etnis Tionghoa, untuk memilih pergi ke luar negeri demi alasan keamanan.

Aksi-aksi tersebut mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang semakin meningkat, di mana demonstrasi menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun demonstrasi dapat menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, tanpa pengelolaan yang baik dan dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, situasi dapat berujung pada ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan menciptakan ruang bagi

partisipasi publik agar demokrasi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif (Mirsal).

Proses Reformasi: Pergeseran Kekuasaan dan Reformasi Institusional

Perspektif institusional sering dianggap sebagai resep yang pasti dan mutlak dalam memotret problema demokrasi pasca-reformasi di Indonesia. Namun, praktek-praktek seperti korupsi, penegakan hukum yang lemah, pelemahan masyarakat sipil, dan ketimpangan ekonomi sering kali muncul dari rahim institusi yang idealis sebagai solusi mengatasi masalah ekonomi politik. Oleh karena itu, pendekatan institusional sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan masalah demokrasi; bahkan, ia tidak mampu menopang kepentingan masyarakat sipil dalam ruang demokrasi. Selain itu, pendekatan struktural juga dikritik karena dianggap terlalu sederhana dalam menganalisis kompleksitas isu-isu demokrasi. Contohnya, ketimpangan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh struktur ekonomi, tapi juga oleh perilaku individual dan interaksi sosial yang kompleks. Banyak analisis yang menunjukkan bahwa struktur sosio-ekonomi yang buruk tidak boleh dijadikan alibi untuk mengabaikan usaha-usaha reformasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi antara perspektif institusional dan struktural untuk mendapatkan solusi yang lebih holistic (Damianus Benediktus Gene Djo & Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila, 2022).

Perkembangan zaman turut mempengaruhi bagaimana gerakan dan aktivisme diorganisasikan untuk memperkuat efektifannya. Namun, ia juga kerap mendapat dukungan yang tidak direncanakan sebelumnya. Perkembangan media dan kemajuan teknologi informasi kerap terlibat dalam perjuangan sebuah gerakan. Misalnya, gerakan reformasi 1998. Hotman Siahaan, guru besar Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan bahwa televisi secara langsung atau tidak langsung telah 'memberi inspirasi kepada gerakan mahasiswa untuk ikut turun ke jalan.' Secara spesifik, Hotman, yang kala itu terlibat langsung dalam mobilisasi gerakan mahasiswa di Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa berita 'Liputan 6' SCTV menjadi referensi paling layak bagi mahasiswa dalam merumuskan isu yang harus dilontarkan dalam aksi demonstrasi (pro Reformasi) di Surabaya. Pada periode 1990-an, media, khususnya televisi swasta, mulai berkembang di Indonesia (Prasisko, 2016). Ia secara langsung atau tidak langsung, direncanakan atau tidak, tak dapat dipungkiri turut mendorong laju gerakan reformasi Indonesia. Tentu ada banyak faktor pemicu atau pendorong gerakan reformasi 1998. Salah satunya terkait dengan perkembangan industri, teknologi, dan kapitalisme di zaman kontemporer adalah terbentuknya kelas baru. Melalui budaya konsumsi, yang kemudian disebutnya sebagai kelas menengah (baru). Ariel berpendapat bahwa konsumerisme dan konsumsi yang tinggi turut memainkan peranan penting dalam politik kultural Indonesia kontemporer. Kelas menengah baru itu diantaranya adalah kalangan alumni dari berbagai kampus, yang perannya dalam gerakan reformasi 1998, tak bisa diabaikan. Mereka terutama terdiri dari kalangan profesional berusia di atas 40an. Sebagian besar adalah 'mantan' aktivis mahasiswa 1970/1980an. Karena situasi krisis ekonomi, sebagian dari mereka menderita karena bisnis yang anjlok atau bangkrut. Tidak ada pilihan lain, kecuali menengok gerakan mahasiswa sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan, baik karena motif-motif pribadi yang dilatari oleh kondisi ekonomi tersebut, maupun motif idealisme sisa-sisa masa mereka aktif dalam aktivisme politik tahun-tahun 1970an dan awal 1980an. Apapun latar belakangnya, pada akhirnya mereka "turun gunung" dan bergabung dengan mahasiswa. Beberapa kelompok mahasiswa bahkan mengendalikan, khususnya melalui bantuan finansial pada gerakan mahasiswa.

Dinamika institusional atau kelembagaan terkait dengan perubahan dan kemajuan dalam kelembagaan, peraturan, dan prosedur. Modifikasi ini dapat bermanifestasi secara

internal dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta secara eksternal karena pengaruh lingkungan seperti kebijakan pemerintah, harapan masyarakat, atau perubahan sosial ekonomi. Dinamika institusi memainkan peran penting dalam pencapaian tata kelola yang efektif. Lembaga yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dan penerimaan terhadap perubahan lebih mungkin untuk secara efektif mengatasi kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan publik yang efisien. Sebaliknya, institusi yang menunjukkan ketidakfleksibelan dan resistensi terhadap dinamika kelembagaan dapat menghadapi tantangan seperti inefisiensi, kurangnya transparansi, dan erosi kepercayaan publik. Dinamika institusional merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dinamika institusional mengacu pada kemampuan sebuah lembaga atau organisasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kapabilitas ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, sistem manajemen, struktur organisasi, kepemimpinan, dan mekanisme akuntabilitas. Di Indonesia, dinamika institusional telah terjadi, misalnya dalam reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun 2010 untuk meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga pemerintah melalui penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem akuntabilitas (Hasanuddin, et al., 2024).

Anggaran pemerintah dikelola dengan hati-hati dan mencatat angka surplus yang cukup besar, sehingga mampu melakukan percepatan pembayaran hutang. Tingkat tabungan domestik juga mencatat angka pertumbuhan yang impresif. Gencarnya proses industrialisasi menyebabkan tingkat tabungan meningkat dan memberi justifikasi bagi masuknya tabungan luar negeri dalam bentuk arus modal masuk. Meskipun neraca perdagangan mencatat defisit, namun diimbangi dengan besarnya surplus neraca modal sehingga nilai akumulasi cadangan devisa terus meningkat dan mencapai puncaknya dollar AS. Kondisi makroekonomi internasional saat itu relatif stabil, serta rendahnya tingkat bunga internasional yang mengindikasikan tidak adanya permasalahan dalam pembayaran angsuran hutang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sampai Agustus 1997, lembaga-lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Euromoney tetap memberikan evaluasi positif tentang kinerja ekonomi Indonesia (Rahman, 2022).

Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode reformasi yang signifikan, melibatkan berbagai perubahan institusional. Salah satu yang paling menonjol adalah **Reformasi Konstitusi**. UUD 1945 mengalami empat kali perubahan antara 1999 dan 2002, dengan hasil yang mencakup pembatasan masa jabatan presiden hingga dua periode, peningkatan peran DPR, serta pengurangan kekuasaan MPR. Selain itu, lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didirikan untuk memperkuat fungsi konstitusional dan memperluas representasi daerah.

Reformasi juga mencakup desentralisasi kekuasaan, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah. Melalui kebijakan ini, sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan dialihkan ke pemerintah daerah. Desentralisasi diharapkan mampu mengurangi dominasi pemerintah pusat di Jakarta dan meningkatkan partisipasi lokal. Namun, tantangan seperti korupsi dan keterbatasan kapasitas di tingkat lokal tetap menghambat implementasi kebijakan ini.

Sistem pemilu juga mengalami perubahan besar. Salah satu terobosan penting adalah diperkenalkannya pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, menggantikan sistem lama di mana presiden dipilih oleh MPR. Selain itu, sistem multipartai diadopsi, yang memungkinkan lebih banyak partai politik ikut serta dalam pemilu. Sistem proporsional terbuka juga diperkenalkan, memberikan hak kepada pemilih untuk memilih kandidat langsung, bukan hanya partai. Upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama reformasi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 menjadi

tonggak dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK diberi wewenang yang luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, serta menangkap pelaku korupsi melalui operasi tangkap tangan. Meski begitu, tantangan besar masih dihadapi, termasuk tekanan politik terhadap KPK serta korupsi yang masih merajalela di tingkat daerah. Di samping itu, reformasi dalam penegakan hukum dan HAM juga menjadi agenda penting. Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjaga independensi peradilan dan menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam hal HAM, undang-undang baru disahkan, termasuk UU No. 39 Tahun 1999, serta penguatan peran Komnas HAM. Meskipun banyak pencapaian telah diraih, reformasi ini masih menghadapi tantangan struktural dan politik dalam pelaksanaannya.

Salah satu perubahan utama adalah pergeseran menuju sistem politik yang lebih demokratis. Sejak 1998, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilu yang memungkinkan rakyat memilih langsung presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Kebebasan berpendapat juga meningkat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat tanpa takut akan represi (Suparno, 2012).

Partisipasi masyarakat dalam proses politik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola urusan mereka sendiri, yang memungkinkan masyarakat terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan lokal. Selain itu, munculnya berbagai organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas pemerintahan dan advokat untuk kepentingan publik.

Reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama pasca-reformasi. Pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting, dengan upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama era Orde Baru (Suparno, 2012).

Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan juga meningkat setelah reformasi. Masyarakat kini memiliki akses lebih besar terhadap informasi mengenai pengelolaan anggaran negara dan dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Pemimpin negara diharuskan untuk lebih bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil, menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel.

Secara keseluruhan, dampak pasca-reformasi terhadap institusi dan masyarakat Indonesia menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan inklusif. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan sosial dan perlindungan hak asasi manusia yang belum memadai, proses reformasi telah membuka jalan bagi perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan Demokrasi Pasca-Reformasi: Menata Ulang Sistem Politik Indonesia

Dengan berakhirnya rezim 32 tahun dan turunnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Meskipun masa jabatannya singkat, Habibie berhasil menerapkan berbagai reformasi yang berdampak besar di berbagai sektor. Salah satu pencapaian penting adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menghapuskan pembatasan terhadap kebebasan pers dan membuka ruang bagi media untuk beroperasi tanpa intervensi pemerintah. Demokrasi yang diterapkan di era reformasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kemiripan dengan sistem demokrasi parlementer, tetapi dengan pengembangan yang lebih baik. Kebebasan pers dan sistem multi-partai kembali diterapkan, dan pemilihan umum menjadi lebih demokratis dan konsisten berkat amandemen UUD 1945 (Christopher Ezra Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, & Ryan Ernando, 2022). Pembagian kekuasaan antar lembaga juga menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga

Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru... (Nadia Kusuma Dewi)

hak-hak warga negara lebih terjamin dan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Habibie juga berusaha mengatasi diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama masa pemerintahannya. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, ia mendorong inklusivitas dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya terpinggirkan oleh kebijakan otoriter Orde Baru. Ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Era reformasi juga ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Masyarakat kini memiliki akses lebih besar untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menciptakan suasana politik yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Secara keseluruhan, era reformasi di bawah kepemimpinan B.J. Habibie tidak hanya membawa perubahan struktural dalam sistem politik Indonesia tetapi juga menciptakan fondasi bagi demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang diambil selama masa pemerintahannya menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia (Christopher Ezra Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, & Ryan Ernando, 2022).

Euforia perubahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru menunjukkan bahwa Orde Baru merupakan sebuah era baru dan harapan baru. Ini merupakan kondisi alamiah dan sangat wajar, karena perjuangan untuk melakukan perubahan biasanya mencapai puncaknya yang dirayakan sebagai kemenangan (Suparno, 2012)

Selama masa rezim Soeharto (Orde Baru), karakteristiknya ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri Presiden, yang akhirnya membuat bangsa Indonesia menghadapi krisis multidimensional. Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi perubahan politis yang radikal. Tuntutan yang dominan pada saat itu adalah implementasi otonomi daerah secepat mungkin atau bahkan perubahan bentuk negara ke federasi. Akibat tekanan yang intens dari tuntutan daerah terhadap pusat, akhirnya UU No. 22 Tahun 1999 dikeluarkan, yang lebih menekankan pada otonomi luas. Setiap pergantian rezim selalu membawa harapan baru untuk kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Jatuhnya Orde Lama yang digantikan Orde Baru, awalnya membawa angin segar dan harapan baru dalam kehidupan politik di Indonesia (Prof. Dr. Ni'matul Huda, 2017). Para teknokrat dari dunia akademis yang bergabung dalam pemerintahan pada awalnya tampaknya membawa inspirasi dan inovasi baru. Namun, akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, Orde Baru pada akhirnya terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter. Akibatnya, hukum ditundukkan untuk mengabdikan kepada sistem kekuasaan represif.

Pasca-jatuhnya Orde Baru, era reformasi pun dimulai dengan harapan besar untuk memperbaiki sistem politik dan meningkatkan demokrasi. Dalam konteks ini, UU No. 22 Tahun 1999 merupakan salah satu langkah strategis dalam merealisasikan otonomi daerah dan meningkatkan kebebasan daerah dalam mengelola urusan internal mereka sendiri. Meski demikian, implementasi otonomi daerah tidaklah mudah dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti permasalahan keuangan dan koordinasi antardaerah (Prof. Dr. Ni'matul Huda, 2017).

Gerakan reformasi di Indonesia berhasil mencapai banyak kemajuan selama masa pemerintahan B.J. Habibie. Meskipun hanya menjabat selama satu tahun, Habibie menghadapi tantangan besar, termasuk kehilangan Timor Timur dan desakan dari masyarakat. Namun, upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan demokrasi pada era reformasi yang dirintisnya masih terus diterapkan hingga saat ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, karena menjaga stabilitas politik

bukanlah hal yang mudah. Meskipun era reformasi dianggap telah memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat, penerapan demokrasi selalu mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa sistem demokrasi diterapkan dengan baik, penting untuk melakukan refleksi sejarah. Melalui refleksi tersebut, masyarakat dapat memahami elemen-elemen yang menjadi kekuatan maupun kelemahan dari setiap sistem demokrasi yang diterapkan pada berbagai periode (Christopher Ezra Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, & Ryan Ernando, 2022).

Demokrasi yang menjadi komponen penting reformasi harus membawa pembaharuan yang lebih baik dan berfaedah bagi rakyat banyak, utamanya dalam merealisasikan mimpi negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, jalannya demokrasi di era reformasi belum memuaskan ekspektasi publik, khususnya kalangan akar rumput yang masih dibebat kemiskinan dan kekurangan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Kalangan akademisi juga berteriak lantang dengan menyebut demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, alih-alih substansial (Boy Anugerah, 2018).

Masalah demokrasi di Indonesia pasca reformasi tidak bisa dilepaskan dari perspektif yang berlaku dominan. Bagi para pendukung teori institusional, masalah demokrasi disebabkan karena lemahnya institusi-institusi negara, serta praktik regulasinya dalam mengatur, mengawasi, dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, solusi yang lebih manjur selalu diarahkan dalam mendorong adanya perbaikan institusi. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, maka problem demokrasi Indonesia ternyata sangat kompleks dan tidak bisa dilepaskan dari problem struktural. Bahkan, perspektif struktural sering terabaikan, absen, atau kurang populer dalam perbincangan ihwal demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Konteks ini menunjukkan bahwa pandangan tradisional tentang demokrasi yang hanya fokus pada perbaikan institusi tidak lagi cukup untuk menjelaskan kompleksitas isu-isu demokrasi di Indonesia. Masalah seperti korupsi, nepotisme, dan ketimpangan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya institusi, tetapi juga oleh struktur sosio-ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif institusional dan struktural dalam memahami dan menyelesaikan masalah demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi sumber-sumber utama masalah demokrasi secara lebih lengkap, sehingga dapat dirancang solusi yang lebih efektif dan berkesinambungan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Referensi tambahan dapat ditemukan dalam karya-karya akademis seperti “Memperkuat Demokrasi di Indonesia” yang menekankan pentingnya integrasi antara institusi, struktur, kulturel, dan agensi dalam memperkuat demokrasi (Damianus Benediktus Gene Djo & Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila, 2022).

SIMPULAN

Gerakan Reformasi 1998 merupakan momen krusial dalam sejarah politik Indonesia, mengakhiri tiga dekade rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Latar belakang dari gerakan ini adalah kombinasi dari krisis ekonomi yang parah, ketidakpuasan politik, serta kondisi sosial yang semakin memanas. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga membawa implikasi besar terhadap politik, sosial, dan struktur pemerintahan di Indonesia. Secara khusus, gerakan Reformasi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan otoriter yang mengekang kebebasan politik dan melanggengkan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) dalam struktur negara.

Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada 1997 menjadi pemicu langsung dari gerakan Reformasi di Indonesia. Saat itu, Indonesia, bersama dengan negara-negara Asia lainnya, mengalami krisis moneter yang sangat parah. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, menyebabkan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok, inflasi yang tidak terkendali, dan gelombang

kebangkrutan di sektor usaha. Industri perbankan juga terpukul keras, dengan banyak bank kolaps atau mengalami kesulitan likuiditas. Krisis ini menambah penderitaan rakyat karena meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang memburuk ini memperburuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto, yang dianggap tidak mampu menangani krisis dengan baik.

Situasi ekonomi yang tak terkendali menciptakan tekanan sosial yang kuat. Warga, terutama kelas menengah dan bawah, merasakan langsung dampak dari krisis ini. Inflasi melonjak hingga lebih dari 70%, menyebabkan harga-harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula naik berkali-kali lipat. Akibatnya, daya beli masyarakat turun drastis, dan banyak keluarga yang terjebak dalam kemiskinan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang diambil pada saat itu tidak mampu memberikan solusi yang signifikan untuk menstabilkan kondisi ekonomi.

Krisis ini juga memperlihatkan dengan jelas kelemahan mendasar dari struktur ekonomi Indonesia pada masa itu, yang terlalu bergantung pada hutang luar negeri dan sumber daya alam. Korupsi yang merajalela di dalam tubuh pemerintahan dan sektor bisnis memperburuk keadaan, memperlambat proses pemulihan ekonomi, dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, koneksi erat antara pejabat pemerintah dan pengusaha—terutama mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto—menciptakan sistem ekonomi yang tidak adil, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan sementara mayoritas masyarakat menderita.

Selain krisis ekonomi, krisis politik juga menjadi faktor yang memperparah kondisi di Indonesia menjelang Reformasi 1998. Soeharto telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, dan dalam periode tersebut, Indonesia berada di bawah pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan penggunaan Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), di mana militer memiliki peran ganda, yaitu sebagai penjaga keamanan dan keterlibatan langsung dalam politik. Hal ini menyebabkan represivitas terhadap kebebasan sipil dan pengekangan terhadap kebebasan berbicara serta berorganisasi.

Sistem politik pada masa Orde Baru juga sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Banyak posisi penting di pemerintahan dan bisnis dipegang oleh keluarga atau orang-orang dekat Soeharto, menciptakan oligarki yang sulit ditembus. Korupsi merajalela di berbagai lini pemerintahan dan sektor swasta, menambah ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak kepada rakyat.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto ini memuncak pada tahun 1998, ketika gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh negeri. Mahasiswa, yang menjadi motor utama dari gerakan ini, menuntut reformasi total di berbagai sektor, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Mereka menuntut diakhirinya pemerintahan otoriter, dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, serta dilakukannya pemilihan umum yang bebas dan adil. Gelombang protes ini semakin menguat ketika elemen-elemen lain dari masyarakat—seperti pekerja, petani, dan kaum intelektual—bergabung untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Puncak dari gerakan Reformasi terjadi pada Mei 1998, ketika Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Pengunduran diri Soeharto ini menandai akhir dari era Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Setelah lengsernya Soeharto, B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, diangkat menjadi Presiden sementara untuk memimpin transisi pemerintahan.

Era pasca-Soeharto ditandai dengan serangkaian reformasi institusional yang bertujuan untuk mengubah sistem politik dan pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis dan transparan. Salah satu reformasi terbesar adalah dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, yang secara signifikan mengurangi peran militer dalam politik. Militer tidak lagi

diizinkan untuk terlibat dalam pemerintahan sipil, dan peran mereka dikembalikan sepenuhnya sebagai penjaga keamanan negara.

Selain itu, reformasi dalam sistem politik juga dilakukan dengan memperkenalkan pemilihan umum yang lebih demokratis dan partisipatif. Pada masa Orde Baru, pemilu yang dilaksanakan sering kali penuh dengan kecurangan dan manipulasi untuk memastikan kemenangan partai yang didukung oleh Soeharto. Namun, pasca-Reformasi, sistem pemilu mulai diperbaiki dengan melibatkan lebih banyak partai politik dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka secara bebas dan adil.

Kebebasan pers juga mengalami kemajuan pesat setelah Reformasi. Pada masa Orde Baru, pers berada di bawah kontrol ketat pemerintah, dan media yang kritis terhadap pemerintah sering kali ditekan atau dibredel. Setelah Reformasi, kebebasan pers dijamin, dan media massa menjadi salah satu pilar penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Media berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Selain di bidang politik, reformasi juga dilakukan di sektor ekonomi. Salah satu perubahan besar adalah diakhirinya monopoli dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat yang selama ini dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto. Pemerintah juga mulai membuka diri terhadap investasi asing dan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim usaha di dalam negeri. Desentralisasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi ekonomi, di mana kekuasaan yang sebelumnya sangat terpusat di Jakarta mulai didistribusikan ke daerah-daerah melalui otonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun era pasca-Reformasi membawa banyak perubahan positif dalam sistem pemerintahan dan politik Indonesia, perjalanan menuju konsolidasi demokrasi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam proses transisi ini, terutama dalam hal memperkuat institusi-institusi demokrasi dan memastikan bahwa reformasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Korupsi, meskipun telah menjadi fokus utama dalam gerakan Reformasi, masih menjadi masalah besar di Indonesia. Praktik-praktik KKN yang sudah mengakar selama puluhan tahun tidak mudah dihilangkan, dan banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi masih terus muncul bahkan setelah era Reformasi. Selain itu, proses reformasi di sektor hukum juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan independensi lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan terkait dengan meningkatnya fragmentasi politik. Munculnya banyak partai politik pasca-Reformasi mencerminkan keterbukaan dalam sistem politik, namun di sisi lain, hal ini juga membuat proses pengambilan keputusan politik menjadi lebih kompleks dan sulit. Koalisi antar partai yang sering kali rapuh dan penuh dengan negosiasi politik jangka pendek menjadi salah satu kendala dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif.

Namun, terlepas dari berbagai tantangan tersebut, Reformasi 1998 telah membawa Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Kebebasan sipil yang lebih besar, sistem pemilu yang lebih adil, serta keterbukaan dalam pemerintahan adalah beberapa hasil nyata dari gerakan Reformasi. Meskipun perjalanan masih panjang, Indonesia telah menempuh langkah-langkah penting menuju sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Krisis Masa Kini dan Orde Baru. (2003). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru... (Nadia Kusuma Dewi)

- Ardi Sunardi, Wilda Nur Afiah, Siti Nuranisya Fadlah, & Eko Ribawati. (2024). KRISIS MONETER 1997-1998: AKAR PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PENANGANAN DI INDONESIA.
- Basuki, & Ahmad Yani. (2013). *Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Boy Anugerah, S. M. (2018). Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat.
- Christopher Ezra Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, & Ryan Ernando. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022.
- Damianus Benediktus Gene Djo, & Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila. (2022). Pelemahan Masyarakat Sipil dan Gagalnya Desain Kelembagaan Demokrasi Pasca Reformasi 1998.
- Fawzia, Diana, Firman Noor, Ikrar Nusa Bhakti, Irine Hiraswari Gayatri, Nurliah Nurdin, . . . Wasisto Raharjo. (n.d.). 4.1. Transisi Politik Pasca Soeharto.
- Haripin, & Muhammad. (2022). *Intelijen dan keamanan nasional di Indonesia pasca-Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasanuddin, Kardinah Indriana Meutia, Rosalina Siagian, Wirawan Widjanarko, Christophorus Indra Wahyu Putra, Gerry Juan Carlos, & Mohamad Saobari. (2024). TRANSFORMASI KEPEMIMPINANDANDINAMIKAINSTITUSIONAL: MEMBANGUNTATAKELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIKMELALUI.
- Kumorotomo, Wahyudi, & Yuyun Purbokusumo. (2020). *Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar*. Ugm Press.
- Maria Winda Klaudia, & Ida Bagus Nyoman Wartha. (2020). Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999.
- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, & Patric C. Wauran. (2020). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS : PEREMPUAN PEKERJA.
- Mirsel, R. (n.d.). PEMBONCENG GRATIS GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA.
- Mujani, & Saiful. (n.d.). *Book Review: Politik indonesia tahun 1990-an: kebangkitan ideologi?*
- Noventari, & Widya. (2016). Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *VIDYA jurnal Universitas Wisnuwardhana*, 24(2), 34-40.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia.
- Prof. Dr. Ni'matul Huda, S. M. (2017). *PENATAAN DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA PASCA-REFORMASI*.

- Rahman, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia.
- Saputri, Dea, Atika Sania Samni Nst, Wanti br Hombing, Siti Fadillah Hasibuan, Lawri Aulia Hasibuan, . . . Rosmawaty Harahap. (2024). IMPLIKASI DINAMIKA REFORMASI 98 PADA NOVEL LAUT BERCERITA DALAM KONTEKS DEKONTRUKSI. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 .
- Sugiharto, & R. Toto. (2017). *Biografi Politik Habibie*. Media Pressindo.
- Sunardi, Ardi, Wilda Nur Afiah, Siti Nuranisya Fadlah, & Eko Ribawati. (2024). KRISIS MONETER 1997-1998: AKAR PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PENANGANAN DI INDONESIA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(7), 21-30.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*.
- Suwirta, & Andi. (2007). Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia. *Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia. Bandung dan Bangi: Historia Utama Press dan Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia]*, 171-188.
- Suwirta, A. (n.d.). Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan.
- Vionita Vara Fitrianti, & Agung Bahroni. (2024). GERAKAN SOSIAL DI YOGYAKARTA DALAM BINGKAI REFORMASI 1998.